

## BAB 3

### KONDISI EKONOMI DAN KEAMANAN

Bab ini akan membahas faktor determinan kedua yang yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam menyetujui *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014. Dalam bukunya William D. Coplin menyebut bahwa terdapat dua indikator dalam mengukur determinan kedua, yaitu kondisi ekonomi Indonesia dan kondisi militer atau keamanan di Indonesia. Sehingga pembahasan pada bab ini akan dibagi menjadi dua, yaitu *pertama* soal kondisi ekonomi Indonesia, yang juga dibagi menjadi dua hal yaitu kapasitas produksi barang dan jasa Indonesia serta kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional. Sementara itu *kedua*, soal kondisi militer Indonesia, pada hal kedua ini memiliki tiga faktor penentu yaitu kapasitas penggunaan militer Indonesia, tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri dan terakhir kestabilan internal dan kemampuan militer. Dengan demikian bab ini hanya akan dibatasi pada hal-hal diatas saja.

#### 3.1 Kondisi Ekonomi Indonesia

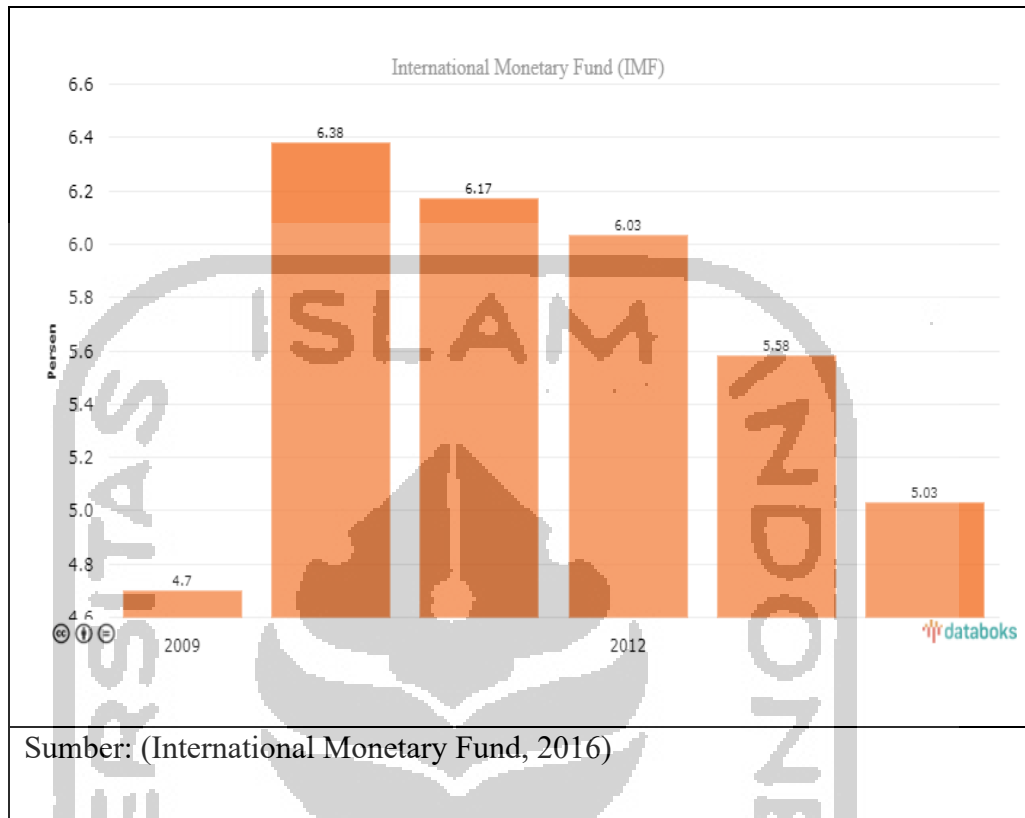
Dalam penjabarannya, Wiliam D. Coplin menerangkan pada dalam determinan ini memiliki dua indikator, pertama adalah kapasitas produksi barang dan jasa, kedua ialah ketergantungan pada perdagangan dan finansial internasional. Dengan demikian maka pada penelitian ini akan membahas mengenai kapasitas produksi barang dan jasa Indonesia, serta menerangkan mengenai kebergantungan Indonesia pada perdagangan dan finansial internasional. Yang mana kedua

indikator tersebut penting untuk melihat alasan Indonesia dalam menandatangani *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 1992, pp. 115-20).

### 3.1.1 Kapasitas Produksi Barang dan Jasa Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan angka ekonomi yang cukup besar. Setiap tahunnya Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi setidaknya 5%. Dalam konteks global GDP (*Gross Domestic Product*) bahkan merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki GDP paling besar. Kondisi ekonomi Indonesia yang besar juga lah membuat Indonesia termasuk sebagai anggota G-20. Tercatat pada tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang stabil diantara tahun 2009-2014. Pada tabel 3.1 dapat dilihat data IMF mengenai pertumbuhan GDP Indonesia.

**Tabel 1.1 Pertumbuhan GDP Indonesia (2009 - 2014)**



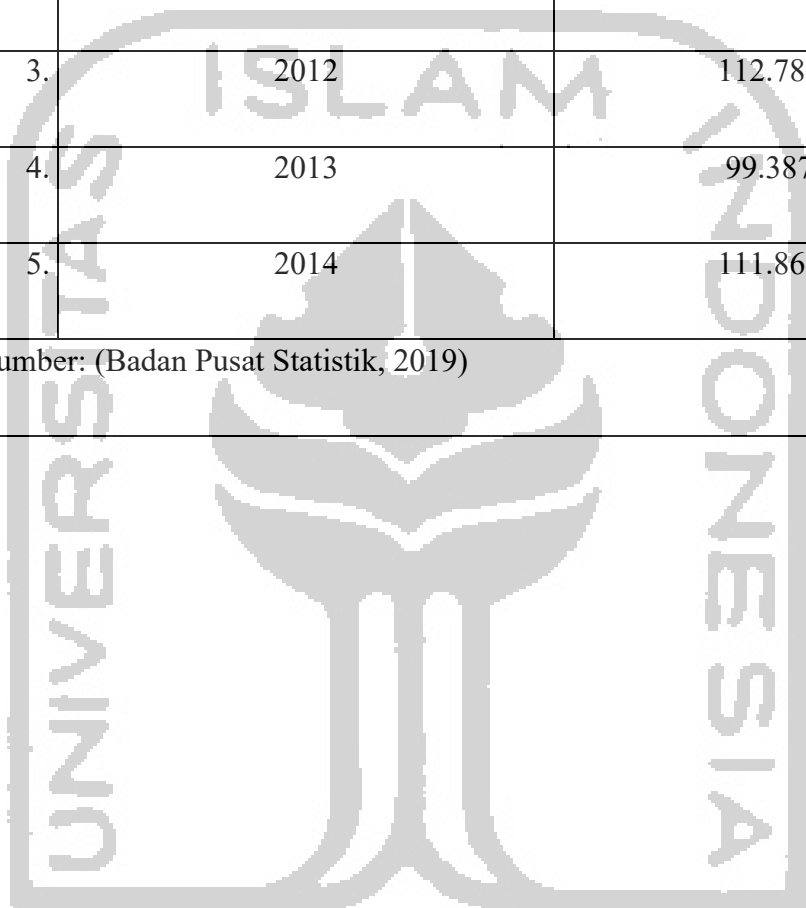
Sementara itu pada sektor jasa, Indonesia cukup bergantung besar pada sektor tenaga kerja luar negeri. Kaitanya terdapat dua fungsi utama dari adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, terutama sektor pembantu rumah tangga. *Pertama*, penyediaan lapangan tenaga kerja di Indonesia. Seperti diketahui bahwa terdapat tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia, berdasarkan data BPS pada tahun 2014 tercatat bahwa terdapat 121,87 juta angkatan kerja, sementara itu terdapat pada bulan agustus 2014 terdapat 7,24 juta orang yang menanggur. Angka ini naik 90.000 jiwa dibandingkan pada bulan februari 2014. Dengan demikian dapat diambil garis besar bahwa terdapat kebutuhan untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat penangguran di Indonesia. Diantaranya adalah dengan mekanisme pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (Suryowati, 2014).

Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terutama dalam bidang informal membantu pemerintah dalam memberikan peluang pekerjaan ke warga negara. Dengan cara ini juga lah membantu mengurangi angka pengangguran. Serapan tenaga kerja informal seperti TKI masih berpengaruh besar dalam pengurangan angka pengangguran di Indonesia seperti pada Agustus 2013, dimana terdapat serapan tenaga kerja sebanyak 7,41 juta. Dalam hal ini masih di dominasi oleh sektor informal (Merdeka, 2014).

*Kedua*, Pendapatan devisa negara, sektor tenaga kerja informal terutama pekerja rumah tangga kerap identitik dengan sebutan pahlawan devisa. Sebutan ini muncul tak lain karena adanya kontribusi sektor informal terutama pekerja rumah tangga terhadap cadangan uang asing Indonesia. Pada tabel 3.2 dapat dilihat jumlah devisa Indonesia pada tahun 2010-2014, dimana terdapat kenaikan yang bertahap jumlah devisa Indonesia. Sementara itu, sektor informal terutama TKI dan TKW berkontribusi besar pada cadangan devisa Indonesia tahun 2013, pada tabel 3.3 dapat dilihat kontribusi besar Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita terhadap cadangan devisa Indonesia. Diawali dengan tahun 2010 yang hanya berkisar 96.207 Triliun menjadi 111 Triliun pada 2014. Angka ini tentu mengalami peningkatan dan menunjukkan kontribusi besar sektor tenaga kerja luar negeri terhadap cadangan devisa Indonesia. Sementara itu dengan cadangan devisa yang stabil, maka akan memungkinkan Indonesia untuk menggunakannya sebagai alat transaksi pembayaran luar negeri. Hal ini dibutuhkan terutama dalam masa pembangunan yang gencar dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Liputan6, 2013).

**Tabel 3.2 Jumlah Devisa Indonesia 2010 - 2014 (Juta US \$)**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Devisa</b>
1.	2010	96.207
2.	2011	110.123
3.	2012	112.781
4.	2013	99.387
5.	2014	111.862
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019)		



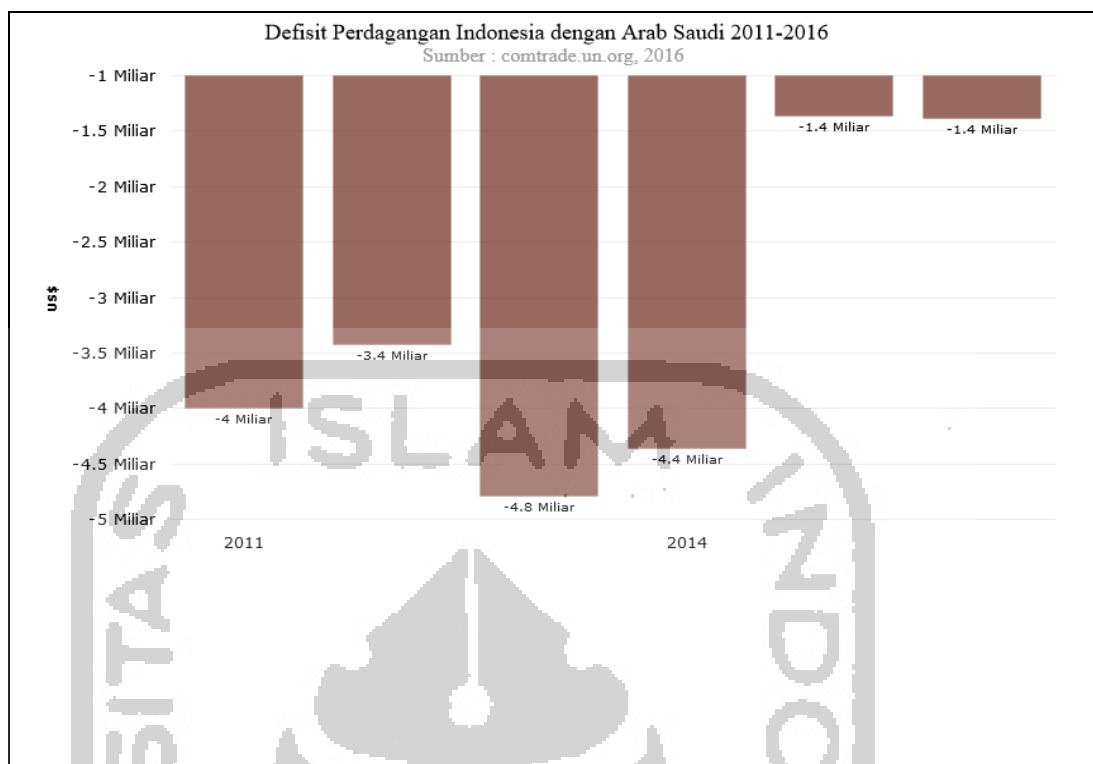
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Tabel 3.3 Jumlah Kontribusi TKI Terhadap Devisa Indonesia 2010-2014 (Rp Triliun)**

No.	Tahun	Jumlah Devisa
1.	2010	92.2
2.	2011	92.3
3.	2012	96.1
4.	2013	101.5
5.	2014	114
Sumber: (Widyanita, 2017)		

### 3.1.2 Kebergantungan pada Perdagangan dan Finansial Internasional

Pada hal ini, meninjau ketergantungan Indonesia pada perdagangan dan finansial internasional. Secara finansial dan perdagangan, pada hal ini lebih khususnya terhadap Arab Saudi, Dalam hubungan perdagangan, Indonesia memiliki neraca perdagangan yang cukup tidak stabil, dimana Indonesia pada masa 2010 hingga 2014 mengalami defisit perdagangan dengan Arab Saudi. Pada gambar 3.1 dapat dilihat jumlah defisit perdagangan Indonesia terhadap Arab Saudi.



Sumber: (Comtrade, 2017)

**Gambar 3.1 Defisit Neraca Perdagangan Indonesia - Arab Saudi (2011 - 2016)**

Adanya defisit ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mengimbangi perdagangan yang diterapkan oleh Arab Saudi. Pada tahun 2014, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami defisit sebesar 4,4 milyar dolar Amerika Serikat. Adapun rincian neraca perdagangan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 Dengan adanya defisit perdagangan juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki ketergantungan secara finansial terhadap Arab Saudi, sehingga tetap melanjutkan hubungan perdagangan meskipun mengalami defisit dalam neraca perdagangan secara berurut dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Meskipun kerap mengalami defisit, namun Arab Saudi masih menjadi tujuan negara ekspor terbesar

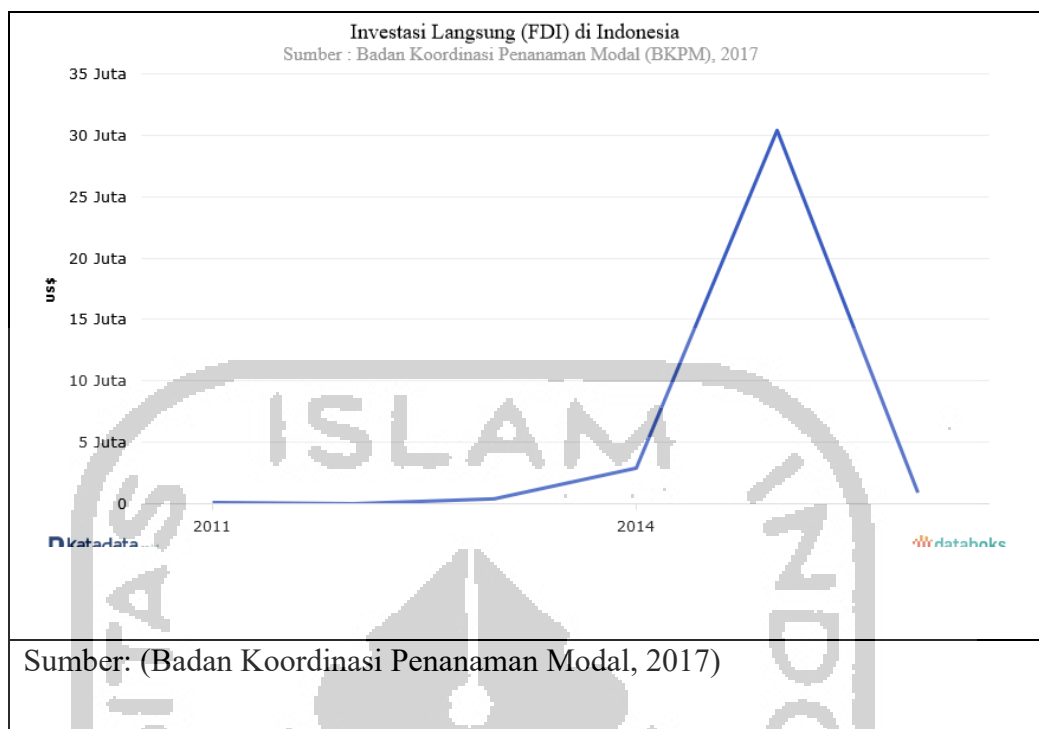
Indonesia di Timur Tengah. Dengan demikian maka posisi Arab Saudi penting bagi mitra bisnis Indonesia (Saputra, 2017).

**Tabel 3.4 Neraca Perdagangan Indonesia - Arab Saudi (2014)**

No.	Uraian	2014
1.	Total Perdagangan	8.672.549,1
	Migas	5.546.681,2
	Non Migas	3.125.867,9
2.	Ekspor	2.156.325,1
	Migas	75,7
	Non Migas	2.156.249,5
3.	Impor	6.516.224,0
	Migas	5.546.605,6
	Non Migas	969.618,4
4.	Neraca Perdagangan	-4.359.898,9
	Migas	-5.546.529,9
	Non Migas	1.186.631,0
<b>Sumber: (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.)</b>		



Sementara itu dalam bidang finansial, Indonesia juga memiliki ketergantungan finansial internasional terhadap beberapa organisasi dan negara di dunia. Diantara beberapa lembaga internasional yang mana Indonesia masih membutuhkan adalah *International Monetary Fund* (IMF) dimana pada tahun 2014, tercatat Indonesia masih memiliki tunggakan hutang terhadap IMF. Sementara itu pada akhir tahun 2014, seiring dengan adanya peralihan kekuasaan presiden Joko Widodo, Indonesia berusaha untuk melakukan pembangunan yang massif di seluruh negeri. Akibatnya terdapat ketergantungan Indonesia pada mekanisme pembangunan melalui hutang dari beberapa negara termasuk Tiongkok. Banyak diantara proyek yang dibangun merupakan bagian dari mekanisme hutang yang diberikan Tiongkok terhadap Indonesia. Disamping itu, selain Tiongkok, Indonesia juga menjalin kerjasama erat dengan Arab Saudi. Dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia, menghasilkan nilai investasi sebesar Rp 99 Triliun (Koran Sindo, 2019). Disamping itu pada tahun sebelumnya yaitu 2011 hingga tahun 2014 terdapat peningkatan tren investasi langsung (foreign direct investment) Arab Saudi di Indonesia, yang mana dapat dilihat nominalnya pada gambar 3.2. Dengan demikian maka Arab Saudi cukup memiliki pengaruh yang signifikan dalam bidang finansial Indonesia.



**Gambar 3.2 Tren FDI Arab Saudi di Indonesia**

### 3.2 Kemampuan Militer Indonesia

Pada penjabarannya, William D. Coplin menerangkan bahwa terdapat tiga indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan militer Indonesia yaitu, kapasitas penggunaan militer, tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri dan kestabilan internal dan kemampuan militer. Sehingga pada penelitian ini, penulis akan menjabarkan mengenai tiga indikator tersebut, yang kemudian menjadi pertimbangan Indonesia dalam menyetujui *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 1992, pp. 124-30).

#### 3.2.1 Kapasitas Penggunaan Militer Indonesia

Indonesia memiliki kekuatan militer yang besar, besarnya kekuatan Indonesia dibuktikan dengan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kuantitas pasukan militer terbesar di Asia Tenggara. Dimana dari tiga komponen

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara membentuk lebih dari 800.000 cadangan. Pada tabel 3.5 dapat dilihat jumlah pasukan yang dimiliki Indonesia di tiga divisi tersebut. Disamping secara kekuatan menyeluruh menurut *Lowy Institute* Indonesia juga merupakan negara dengan kekuatan militer dan non-militer terkuat ke 13 terkuat di Asia Pasifik. Dengan demikian tentu dapat diketahui bahwa kapasitas penggunaan militer Indonesia bukan merupakan hal yang dapat diremehkan.

**Tabel 3.5 Jumlah Pasukan Tentara Nasional Indonesia**

No.	Jumlah Total Pasukan	Pasukan Aktif	Pasukan Cadangan
1.	800.000	400.000	400.000
Sumber : (Globalfirepower, 2019)			

Disamping itu, untuk menunjang pertahanan Indonesia juga memiliki alokasi anggaran APBN pada bidang pertahanan yang besar. Pada tahun 2010 hingga 2014, terdapat kenaikan berkala anggaran APBN terhadap bidang pertahanan. Dimana hanya sebanyak 42.4 T di tahun 2010 menjadi 86.5 T pada tahun 2014. Pada tabel 3.6 dapat dilihat alokasi anggaran APBN terhadap sektor pertahanan pada tahun 2010 hingga 2014. Dengan demikian maka diketahui bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang besar dalam bidang militer.

**Tabel 3.6 Alokasi APBN Terhadap Bidang Pertahanan 2010 - 2014**

No.	Tahun	Alokasi Anggaran
1.	2010	42.4 T
2.	2011	51.2 T
3.	2012	61.3 T
4.	2013	87.7 T
5.	2014	86.5 T
Sumber: (Kementrian Keuangan, 2016)		

### **3.2.2 Tingkat Ketergantungan Pada Sumber-Sumber Luar Negeri**

Pada hal ini menjabarkan sejauh mana tingkat ketergantungan Indonesia pada sumber-sumber alutista yang dibuat oleh pihak luar negeri. Sebelum menjabarkan mengenai ketergantungan Indonesia pada sumber-sumber alutista luar negeri. Dalam pemenuhan kebutuhan alutista dalam negeri, Indonesia memiliki sumber-sumber pemasok dalam negeri, dalam hal ini Indonesia memasok secara mandiri alutista dalam negeri. Suplai dilakukan dengan beberapa perusahaan lokal seperti PT. Pindad yang menghasilkan beberapa kendaraan lapis baja seperti Anoa. Disamping itu juga menggantungkan diri pada senjata api yang diproduksi oleh PT. Pindad. Disamping Pindad, pemerintah Indonesia juga menggunakan produk alutista perusahaan lokal lain seperti PT. PAL yang mulai melakukan produksi kapal perang dan kapal selam. Selain 2 perusahaan lokal tersebut, dalam bidang

pertahanan udara juga Indonesia membeli beberapa hasil produksi PT. Dirgantara Indonesia (DI) (Pindad, 2014).

Meskipun telah menggunakan alutista buatan dalam negeri, namun Indonesia juga masih bergantung besar pada pembelian persenjataan luar negeri. Sampai pada tahun 2015, Indonesia masih menjadi negara importir alutista terbesar di ASEAN. Menurut *Stockholm International Peace Research Institute (ISPRI)* komposisi impor senjata Indonesia mencapai angka transaksi USD 683 juta. Adapun alutista impor terdiri dari 648 unit berasal dari Tiongkok, 505 unit berasal dari Inggris dan 462 unit berasal dari Rusia. Sementara itu alutista yang paling sering di impor oleh Indonesia adalah C-705, Starstreak, FGM-148 Javelin, AGM-114K HELLFIRE, dan Mistral. Ketergantungan Indonesia pada alutista asing juga menjadikan Indonesia berada pada posisi 10 sebagai importer senjata terbesar di dunia. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa meski telah dapat memproduksi alutista secara mandiri, namun Indonesia tetap mengandalkan alutista luar negeri yang lebih canggih. Sehingga dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap sumber alutista luar negeri (Hartriani, 2016).

### **3.2.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang dimana terdapat sekitar 250 juta per-jiwa. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Selain memiliki jumlah penduduk yang terbesar, Indonesia juga merupakan multi-agama dan multi-etnis sehingga negara dengan jumlah etnis terbanyak di dunia. Dengan keanekaragaman ini, tentu memungkinkan terjadinya ancaman internal

sehingga terdapat beberapa hal yang mengancam kestabilan keamanan internal Indonesia.

Dalam poin ini membahas mengenai ancaman-ancaman yang dapat muncul terhadap kestabilan internal Indonesia, serta sejauh mana kemampuan militer Indonesia dapat mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Diantara beberapa ancaman-ancaman yang dapat muncul adalah sebagai berikut:

*Pertama, ancaman terorisme.* Indonesia merupakan negara dengan letak yang strategis, menyebabkan menjadi tempat menarik bagi terorisme. Hal ini dibuktikan dengan pendirian beberapa organisasi di Asia Tenggara yang masih berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS. Diantara organisasi tersebut adalah *Jamaah Islamiyah, Jamaah Anshorut Daulah*. Tidak hanya itu tapi di tabel 3.7 ada 18 kelompok teroris yang ikut jaringan Al-Qaeda dan ISIS. Dalam tahun kebangkitan ISIS di tahun 2014, muncul beberapa kelompok jaringan dengan ISIS di Indonesia dan melakukan serangan teroris di Indonesia seperti JAD. Dengan demikian maka ancaman terorisme merupakan ancaman yang paling besar untuk terjadi pada tahun 2013 pelaku yang belum diketahui identitas meledakkan diri di depan Mapolres Poso. Sehingga Indonesia masih menjadi target serangan utama teroris lokal. Meskipun demikian, Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kelompok teroris. Densus 88 merupakan salah satu lembaga kepolisian yang bertugas untuk melawan pergerakan terorisme di Indonesia.

Disamping Densus 88 dan kepolisian, terdapat juga komponen Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam pemberantasan terorisme, misalnya adalah terorisme di Sulawesi. Sehingga Indonesia mampu menghadapi hal ini. Adapun

kaitanya dengan Arab Saudi adalah, Arab Saudi merupakan mitra utama Indonesia dalam menangani dan mengangkal ideologi teroris, hal ini mengingat Arab Saudi adalah negara yang dianggap menjadi pusat Islam di dunia. Dalam upayanya, Arab Saudi secara rutin mengirimkan ulama untuk bekejasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berupa dakwah agar teroris sadar (Linggasari & Armandhanu, 2015).

**Tabel 3.7 Daftar Kelompok Terorisme di Indonesia**

No.	Nama Kelompok Teroris
1.	Mujahidin Indonesia Barat (BIB)
2.	Mujahidin Indonesia Timur (MIT)
3.	Jamaah Ansharuut Tauhid (JAT)
4.	Ring Banten
5.	Jamaah Tawhid wal Jihad
6.	Forum Aktivis Syariah Islam (FAKSI)
7.	Pendukung dan pembela daulah
8.	Gerakan Reformasi Islam
9.	Asybal Tawhid Indonesia
10.	Kongres Umat Islam Bekasi
11.	Umat Islam Nusantara

No.	Nama Kelompok Teroris
12.	Ikhwan Muwahid Indunisy Fie
13.	Jazirah al-Muluk (Ambon)
14.	Ansharul Kilafah Jawa Timur
15.	Halawi Makmun Group
16.	Gerakan Tawhid Lamongan
17.	Khilafatul Muslimin
18.	Laskar Jundullah
Sumber: (Laisila, 2015)	

*Kedua, ancaman konflik perbatasan.* Indonesia memiliki beberapa sengketa dengan negara-negara tetangga. Diantaranya adalah dengan Tiongkok di laut Natuna Utara. Dengan Malaysia di perbatasan Kalimantan, serta beberapa negara tetangga lainnya. Meskipun demikian, sengketa dengan Tiongkok di laut natuna utara merupakan sengketa yang paling berpotensi mengancam Indonesia. Hal ini disebabkan karena Tiongkok merupakan negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di Asia, disamping itu dengan adanya pembangunan pangkalan militer di Laut Tiongkok Selatan menjadi alasan lain bagi Indonesia untuk waspada. Tidak jarang pula manuver militer tersebut juga digunakan untuk melakukan intimidasi terhadap Indonesia. Hal ini seperti aksi yang dilakukan oleh kapal keamanan laut Tiongkok yang melakukan intimidasi terhadap KRI Iman Bonkol saat sedang



melakukan penangkapan kapal Tiongkok di ilegal di laut Natuna Utara. Dengan adanya konflik-konflik perbatasan ini maka setidaknya Indonesia memiliki tentara nasional Indonesia yang bersiaga untuk menjaga wilayah Indonesia. Untuk itu Indonesia membangun pangkalan militer di wilayah Natuna, untuk menghadapi kemungkinan agresi yang dilakukan oleh Tiongkok (Idris, 2018).

Dengan ancaman-ancaman diatas, dapat memicu ketidakstabilan internal Indonesia. Meskipun demikian, ancaman-ancaman yang berpotensi untuk mengganggu kestabilan di Indonesia bias teratasi dikarenakan Indonesia memiliki jumlah Tentara terbanyak pertama di Asia Tenggara dan ditunjang dengan kepolisian yang juga memiliki personil yang berkualitas

